

## **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Melalui Program Pengelolaan Sampah Organik**

**Salma Nurramadhani Permana<sup>1</sup>, Rini Sulastri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, salma.nurramadhani17@gmail.com

<sup>2</sup>Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, rinisulastri10@uinsgd.ac.id

### **Abstrak**

Permasalahan pengelolaan sampah organik di Kota Bandung menjadi semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah dan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebagai respons atas kondisi ini, Pemerintah Kota Bandung menerapkan program pengelolaan sampah berbasis maggot melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik di Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul. Pemberdayaan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, metode yang digunakan yakni metode *Asset-Based community Development (ABCD)*, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil pemberdayaan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program maggot memberikan dampak positif dalam mengurangi volume sampah serta meningkatkan kesadaran lingkungan. Terdapat resistensi warga akibat stigma negatif terhadap maggot menjadi hambatan utama. Strategi edukasi, komunikasi persuasif, serta pendekatan kultural berhasil mengubah persepsi warga dan meningkatkan partisipasi aktif. Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dapat menjadi solusi berkelanjutan jika didukung oleh komunikasi yang efektif dan pelibatan warga sejak tahap awal.

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Maggot, Biokonversi*

### **Latar Belakang**

Sampah menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Jawa Barat menyumbang 27,4% dari total sampah nasional, dengan sampah rumah tangga sebagai penyumbang utama sebesar 63,53% (GoodStats, 2024). Kota Bandung berkontribusi sebesar 7,1% terhadap total sampah di Jawa Barat, dengan komposisi sampah organik yang mendominasi hingga 44,52%. Dari total 1.796,51 ton sampah yang dihasilkan setiap harinya, hanya 993 ton yang dapat diangkut ke TPA Sarimukti karena keterbatasan kapasitas, sehingga 803,51 ton sisanya tidak terangkut (Detikcom, 2024).

Salah satu wilayah yang terdampak kondisi ini adalah Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Wilayah ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, terutama setelah ditutupnya TPS Pasar Kordon pada 24 Mei 2023. Penutupan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara berbagai pihak seperti Forkompimcam, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perhubungan (DISHUB), lurah, pengelola pasar, dan tokoh masyarakat. Pada awalnya, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penumpukan sampah dan kemacetan, tetapi sebagian warga masih membuang sampah di lokasi tersebut, sehingga volume sampah kembali meningkat (Pikiran Rakyat, 2023). Masalah pengelolaan sampah di tingkat masyarakat setempat menjadi semakin mendesak setelah kebijakan pengurangan volume sampah dari Kota Bandung yang dikirim ke TPA Sarimukti diberlakukan. Penutupan TPS dan pengurangan kiriman sampah membuat permasalahan yang kompleks seperti adanya tumpukan sampah di depan rumah warga dan titik-titik liar. Hal tersebut dapat menimbulkan pencemaran, gangguan kesehatan, hingga konflik sosial.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah organik dari rumah guna mengurangi volume sampah (Portal Bandung, 2023). Kebijakan ini membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

sekaligus membantu mengurangi beban lingkungan. Keterlibatan masyarakat juga dinilai dapat menciptakan nilai ekonomi tambahan. Kenyataannya pada praktik di lapangan, proses partisipatif ini menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi kesadaran warga, dukungan kelembagaan, hingga infrastruktur teknis. Sebagaimana ditunjukkan oleh Atma dkk. (2022), keberhasilan pengelolaan maggot sebagai solusi pengolahan sampah rumah tangga di Lamongan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif warga yang diberdayakan melalui pelatihan dan insentif ekonomi. Studi Adhi et al. (2021) di Desa Domas menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan mampu meningkatkan kesadaran dan keberlanjutan praktik pemilahan sampah organik dan anorganik. Zahra et al. (2023) merumuskan bahwa model biokonversi berbasis pemberdayaan dengan larva Black Soldier Fly terbukti efektif mereduksi sampah dan membentuk sistem ekonomi sirkular, terutama jika didukung oleh kolaborasi antar aktor lokal.

Berbeda dengan temuan-temuan tersebut yang sebagian besar menyoroti keberhasilan program, konteks di Kota Bandung, khususnya di Kelurahan Kujangsari memperlihatkan dinamika sosial yang lebih kompleks. Implementasi program berbasis maggot menghadapi resistensi warga dan minimnya partisipasi aktif. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami aspek sosial dan hambatan implementasi yang terjadi di tingkat lokal. Pemberdayaan ini berfokus pada kajian mengenai bagaimana proses implementasi, hambatan, serta strategi penyelesaian hambatan dalam pengelolaan sampah organik dilakukan di Kelurahan Kujangsari, dengan harapan dapat memberikan masukan berbasis data untuk keberlanjutan program.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam pemberdayaan ini adalah (1) Bagaimana kebijakan pemerintah pengelolaan sampah organik diterapkan di Kelurahan Kujangsari? (2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar program dapat berjalan?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pemberdayaan ini adalah untuk mengkaji penerapan kebijakan pengelolaan sampah organik di Kelurahan Margasari, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah organik, dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Secara teoritis, kajian ini relevan untuk memperkaya literatur mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Secara praktis, hasil pemberdayaan ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan pengelola program dalam merancang kebijakan pengelolaan sampah yang partisipatif. Secara sosial, pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan memperkuat solidaritas antar masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Sampah**

Permasalahan sampah, khususnya sampah organik, menjadi isu utama di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung. Sampah merupakan material sisa dari aktivitas manusia yang tidak lagi memiliki nilai guna, dan secara umum dibedakan menjadi dua jenis: sampah anorganik dan organik. Sampah anorganik berasal dari bahan non-hayati seperti plastik, logam, dan kaca yang sulit terurai, sementara sampah organik lebih mudah terurai karena berasal dari sisa makhluk hidup seperti makanan dan daun-daunan (Imelda, 2020). Jika tidak dikelola dengan baik, terutama sampah organik, akan menimbulkan bau tidak sedap, pencemaran lingkungan, serta gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis semata, melainkan juga harus dibarengi dengan pendekatan sosial melalui keterlibatan

---

aktif dan pemberdayaan masyarakat, agar mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memperoleh manfaat dan kemandirian dari proses tersebut.

Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, yang menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah organik pasca penutupan TPS Pasar Kordon. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan maggot telah diperkenalkan di wilayah ini sebagai strategi alternatif yang tidak hanya menanggulangi limbah organik, tetapi juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi baru bagi warga. Untuk mencapai keberhasilan seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Atma dkk. (2022) di Lamongan dan Zahra dkk. (2023) melalui model biokonversi larva BSF berbasis masyarakat, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial lokal serta pendekatan partisipatif yang tepat agar program serupa dapat berkelanjutan dan diterima oleh warga Kujangsari.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah proses memberikan kapasitas, sumber daya, dan kesempatan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Pemberdayaan dalam konteks ini ditekankan pada pentingnya kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan aktif dalam seluruh tahapan program (Maryani & Nainggolan, 2019). Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan masyarakat miskin atau terpinggirkan untuk memperoleh kontrol atas kehidupan mereka melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan tidak semata berarti memberikan bantuan, tetapi memberikan ruang dan daya (*power*) agar masyarakat dapat berdiri sendiri (Jasmin dkk., 2024).

Pada konteks pengelolaan sampah organik di Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, pemberdayaan masyarakat tercermin dalam pelibatan warga dalam proses pemilahan sampah dari rumah, pelatihan budidaya maggot, serta partisipasi aktif dalam pemeliharaan rumah maggot yang disediakan. Model ini sejalan dengan pendekatan pemberdayaan yang telah berhasil diimplementasikan di daerah lain, seperti dalam studi Adhi, M. et al. (2021) di Desa Domas yang menekankan pentingnya partisipasi warga dalam pengelolaan sampah untuk mendorong perilaku berkelanjutan, serta studi Atma dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa pelibatan warga dalam budidaya maggot mampu meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi beban lingkungan. Agar pemberdayaan benar-benar berhasil, dimensi kesetaraan (*equality*), partisipasi (*participation*), dan keberlanjutan (*sustainability*) perlu diperhatikan secara serius. Di Kujangsari, pelaksanaan program menghadapi tantangan, seperti resistensi sebagian warga, ketimpangan partisipasi, dan minimnya pelibatan dalam proses pengambilan keputusan. Jika program tidak sesuai dengan kebutuhan atau harapan warga, atau ketika terjadi ketimpangan otoritas antara pengambil kebijakan dengan masyarakat sebagai pelaksana, maka konflik sosial dan kegagalan implementasi bisa terjadi. Proses pemberdayaan di Kelurahan Kujangsari perlu terus dievaluasi agar mampu membangun kemandirian.

### **Teori Konflik**

Teori konflik memandang masyarakat sebagai arena perebutan kekuasaan dan sumber daya, di mana konflik muncul akibat ketimpangan struktur otoritas antara kelompok dominan dan kelompok yang didominasi (Ritzer & Stepnisky, 2019). Pada konteks pemberdayaan, konflik terjadi ketika masyarakat tidak dilibatkan secara setara dalam pengambilan keputusan atau ketika program dijalankan secara *top to down* tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya setempat. Hal ini terlihat di Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, ketika warga merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program rumah maggot. Kekhawatiran terhadap potensi bau dan pencemaran menjadi bentuk resistensi simbolik

---

terhadap kebijakan yang dianggap datang dari atas, mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah kelurahan, DLHK, fasilitator, dan masyarakat sebagai pelaksana program. Konflik tidak selalu bersifat destruktif jika dikelola secara dialogis. Konflik dapat menjadi pemicu munculnya kesadaran kolektif dan memperbaiki struktur sosial yang timpang (Zuldin, 2019). Pada hal ini, penolakan terhadap rumah maggot bukan semata-mata bentuk ketidaktahuan, melainkan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap kurangnya transparansi, komunikasi terbatas, dan minimnya partisipasi seajar.

Gagasan Paulo Freire memperkuat pemahaman ini dengan menekankan pentingnya *conscientização* atau kesadaran kritis terhadap kondisi ketidakadilan yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan reflektif-transformasional (*praxis*) untuk mengubahnya. Freire melihat konflik antara kelompok dominan dan tertindas sebagai bagian alami dari proses pemberdayaan (Akhter, S. dkk., 2023). Melalui dialog yang setara dan reflektif, konflik menjadi jalan menuju pembebasan dan transformasi sosial. Pada konteks Kujangsari, pendekatan Freire sangat relevan. Proses pemberdayaan perlu dimulai dengan mengajak warga berdialog, memberi ruang untuk kritik, dan bersama-sama merancang solusi atas persoalan lingkungan. Pendekatan *problem-posing education* yang ditawarkan Freire dapat digunakan dalam pelatihan maggot, di mana fasilitator tidak hanya menyampaikan materi, tetapi membimbing warga untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan bertindak bersama. Dengan demikian, pemberdayaan tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi juga menysasar relasi kuasa yang lebih adil dan berkelanjutan.

### **Metode**

Pemberdayaan ini menggunakan metode *Asset-Based Community Development (ABCD)*, yaitu metode pemberdayaan yang berfokus pada potensi, aset dan kekuatan yang dimiliki oleh komunitas, bukan kekurangannya. Metode *ABCD* dalam pemberdayaan ini membantu mengungkap bagaimana aset sosial, relasional, dan lingkungan lokal dapat dioptimalkan dalam pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat. Pemberdayaan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pengelolaan sampah organik berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dilaksanakan di Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, yang merupakan salah satu wilayah terdampak krisis pengelolaan sampah serta lokasi penerapan program budidaya maggot. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan ketua RT, RW, dan petugas maggot untuk memahami proses implementasi dan keterlibatan warga serta wawancara dengan warga itu sendiri. Observasi non-partisipan dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan dan respons masyarakat terhadap program. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung. Pelaksanaan pengamatan pemberdayaan berlangsung selama dua bulan, dimulai pada Maret 2025 hingga Mei 2025. Seluruh data dianalisis dengan merujuk pada kaidah analisis kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil Kegiatan**

Program pengelolaan sampah organik berbasis maggot di Kota Bandung diluncurkan sebagai respons terhadap krisis sampah yang memuncak pada akhir 2023. Pemerintah Kota Bandung, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), menggandeng kecamatan dan kelurahan untuk mengimplementasikan program ini dengan tujuan utama mengurangi volume sampah organik di tingkat kelurahan. Setiap kelurahan di Kota Bandung ditargetkan memiliki satu rumah maggot dengan luas sekitar 100 meter persegi. Jika lahan tidak mencukupi, rumah maggot dapat dibagi menjadi beberapa lokasi. Rumah-rumah maggot ini dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk budidaya maggot,

termasuk pemberian bibit maggot (telur) yang disediakan oleh pemerintah. Siklus budidaya maggot harus dijaga agar tidak terputus untuk memastikan efektivitas dalam mereduksi sampah organik.

Sebanyak 604 orang direkrut sebagai petugas pengolah sampah organik dan disebar ke 151 kelurahan di Kota Bandung. Mereka diberikan pelatihan selama dua hari mengenai teknik budidaya maggot dan pengelolaan administrasi. Tugas mereka meliputi pencatatan jumlah sampah organik yang diolah setiap minggu dan bulan, serta memastikan kelangsungan siklus budidaya maggot. Petugas ini digaji oleh kelurahan dan statusnya setara dengan petugas kebersihan lingkungan (Gober). Program ini melibatkan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pemilahan sampah di rumah masing-masing. Kebijakan "tidak dipilah, tidak diangkut" diterapkan untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik yang telah dipilah kemudian diangkut oleh petugas sampah ke rumah maggot untuk diolah lebih lanjut.

Salah satu bentuk implementasi program pengelolaan sampah berbasis maggot di Kelurahan Kujangsari dapat terlihat dari aktivitas warga bersama petugas dalam proses pengumpulan dan pemilahan sampah organik. Dokumentasi berikut memperlihatkan kegiatan pengangkutan sampah organik hasil pilahan warga menuju rumah maggot untuk diolah lebih lanjut.

**Gambar 1. Rumah Maggot**



*Sumber:* Dokumentasi Pribadi Informan (2024)

Gambar 1 ini menampilkan seorang petugas maggot yang sedang melakukan seleksi sampah organik, yaitu proses awal dari siklus pengolahan maggot. Sampah-sampah yang masuk terlebih dahulu dipilih agar tidak tercampur dengan unsur anorganik seperti plastik atau logam. Proses ini sangat krusial karena kontaminasi sampah anorganik dapat mengganggu sistem metabolisme maggot, bahkan berpotensi membunuh larva yang sedang berkembang. Kegiatan ini menggambarkan keterampilan teknis hasil pelatihan, sekaligus menunjukkan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui transfer pengetahuan dalam praktik lapangan. Dengan adanya proses seleksi manual ini, warga tidak hanya berperan sebagai pembuang

sampah, melainkan sebagai bagian dari rantai pengelola yang aktif menjaga kualitas input rumah maggot.

Rumah maggot merupakan pusat pengolahan sampah organik yang dirancang sebagai ruang bio industri mikro berbasis masyarakat. Foto berikut memperlihatkan kondisi di dalam rumah maggot yang telah ditata agar higienis, efisien, dan bebas bau, sebagai upaya menghapus stigma negatif masyarakat terhadap proses budidaya maggot.

### **Gambar 2. Suasana dalam Rumah Maggot**



Sumber: Dokumentasi Pribadi Informan (2024)

Gambar 2 ini menunjukkan kondisi di dalam rumah maggot yang tampak terorganisir dan bersih, dengan rak-rak besi sebagai tempat wadah budidaya larva *Black Soldier Fly*. Setiap wadah memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari tempat penetasan telur, pembesaran larva, hingga area panen. Penataan ruang yang rapi ini mencerminkan standar manajemen lingkungan berbasis bio-industri mikro, yang diadaptasi di lingkungan masyarakat. Kebersihan dan tata kelola ruang dalam rumah maggot sekaligus menjadi argumen pembanding terhadap stigma negatif dari sebagian masyarakat yang mengira rumah maggot akan mencemari lingkungan. Padahal, seperti terlihat dalam gambar, lingkungan dalam rumah maggot dikondisikan agar tetap higienis dan bebas bau. Hal ini mendukung penjelasan bahwa maggot bukanlah tempat yang berpenyakit, tapi justru menghilangkan potensi bau dari sampah organik yang membusuk, karena maggot akan mengurai sisa makanan sebelum terfermentasi.

Proses biokonversi dalam rumah maggot menjadi tahapan inti dalam pengelolaan sampah organik. Pada tahap ini, larva maggot secara aktif mengurai limbah organik rumah tangga dengan sangat efisien, memperlihatkan peran ekologisnya sebagai agen daur ulang alami yang ramah lingkungan.

**Gambar 3. Rumah Maggot**



Sumber: Dokumentasi Pribadi Informan (2024)

Gambar 3 ini memperlihatkan maggot yang sedang aktif mengurai sampah organik. Aktivitas ini merupakan tahap inti dari proses biokonversi, di mana maggot mengonsumsi limbah organik dengan sangat cepat, yakni dalam waktu kurang dari 24 jam. Dari sudut pandang ekologis, ini menunjukkan efektivitas sistem alami dalam mendaur ulang sampah tanpa memerlukan pembakaran atau proses kimia yang merusak lingkungan. Selain itu, hasil biokonversi berupa *frass* (kotoran maggot) dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, dan larvanya bisa dijadikan pakan ikan atau unggas, sehingga menciptakan rantai ekonomi sirkular berbasis lingkungan.

## **Pembahasan**

### **Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Organik**

Pemerintah Kota Bandung merespons permasalahan penumpukan sampah organik dengan mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis maggot. Kebijakan ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan untuk mendirikan rumah maggot di setiap kelurahan. Tujuannya adalah untuk mengurangi volume sampah organik di tingkat kelurahan melalui proses biokonversi oleh larva Black Soldier Fly (BSF). Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menyatakan bahwa proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki kondisi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, yang dalam konteks ini masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah organik melalui pelatihan dan sosialisasi (Maryani & Nainggolan, 2019). Hasil penelitian Nuraini dan Prasetyo (2022) mendukung pendekatan ini, menunjukkan bahwa keberhasilan program maggot di Kota Malang sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan. Melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis, masyarakat tidak hanya memahami proses biokonversi, tetapi juga mampu mengelola unit produksi secara mandiri.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh peran aktif masyarakat itu sendiri yang harus memiliki tekad kuat untuk bangkit dan berdaya (Margayaningsih, 2020). Pemerintah berperan dalam memberikan penguatan melalui kebijakan yang dapat diterima secara adil dan merata oleh masyarakat, berupa layanan publik dan program pemberdayaan masyarakat. Pada program pengelolaan sampah organik berbasis maggot tidak hanya bertujuan

untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan peluang ekonomi baru melalui budidaya maggot. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Kusumastuti dan Kurniawan (2021), yang menunjukkan bahwa program maggot di Sleman berhasil mengurangi volume sampah rumah tangga secara signifikan dan meningkatkan kesadaran kolektif warga dalam memilah sampah dari sumbernya. Kebijakan pengelolaan sampah organik berbasis maggot di Kota Bandung menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan pendekatan partisipatif dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan, meskipun menghadapi hambatan sosial yang memerlukan penanganan melalui komunikasi dan edukasi yang intensif. Pada konteks ini, Rahmawati (2020) menekankan pentingnya pendekatan edukatif dalam pengelolaan sampah berbasis maggot di Denpasar.

Melalui metode penyuluhan, simulasi langsung, dan keteladanan, terjadi perubahan perilaku masyarakat secara bertahap dalam mengelola sampah organik. Bukan hanya sebagai solusi teknis, kebijakan ini juga memiliki dimensi edukatif yang mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pemerintah menerapkan prinsip “tidak dipilah, tidak diangkat”, yang mendorong warga untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya, yaitu rumah masing-masing. Hal ini menciptakan kesadaran ekologis kolektif yang menjadi dasar penting bagi keberhasilan jangka panjang dari program ini. Perubahan perilaku ini tidak tercipta secara instan, melainkan melalui proses sosialisasi, edukasi, dan keteladanan dari para pelaksana program, termasuk petugas maggot yang sehari-hari menjadi penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan rumah maggot juga menciptakan ruang ekonomi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Hasil budidaya maggot, seperti larva kering, memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat dijual sebagai pakan ikan, unggas, atau hewan eksotis, sementara itu frass (hasil kotoran maggot) dapat dijadikan pupuk organik untuk pertanian atau tanaman hias. Program ini tidak hanya berdampak pada pengurangan volume sampah, tetapi juga membuka potensi ekonomi sirkular yang berbasis pada limbah rumah tangga. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya memecahkan masalah lingkungan, tetapi juga mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan peluang ekonomi lokal.

### **Hambatan Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Organik**

Pelaksanaan program pengelolaan sampah organik berbasis maggot di Kelurahan Kujangsari menghadapi tantangan signifikan berupa resistensi dari warga sekitar lokasi rumah maggot. Penolakan ini bukan disebabkan oleh aspek teknis, melainkan oleh faktor sosial-kultural yang mencakup kekhawatiran terhadap gangguan kenyamanan, seperti bau, keberadaan lalat, dan penurunan estetika lingkungan. Lokasi rumah maggot yang berada di pintu masuk perumahan memperkuat kekhawatiran tersebut. Reaksi ini mencerminkan adanya ketegangan antara upaya ekologis dan kenyamanan domestik, yang dalam kerangka teori konflik dipahami sebagai akibat ketimpangan kuasa antara pelaksana kebijakan yakni kelurahan, DLH, dan fasilitator maggot, dan warga sebagai penerima dampak (Ritzer & Stepnisky, 2019). Penolakan warga seperti ini juga ditemukan dalam penelitian Sriyani dan Wirasari (2023) di Kota Malang, yang mencatat bahwa resistensi terhadap program maggot muncul karena ketidaksesuaian antara pendekatan teknis pemerintah dan persepsi warga terhadap lingkungan bersih. Penelitian oleh Nurochim (2022) di Sleman menunjukkan bahwa pelibatan warga yang bersifat *top to down* cenderung menciptakan jarak dan menghambat partisipasi aktif. Kedua penelitian tersebut memperkuat temuan di Kujangsari bahwa konflik dalam program lingkungan kerap berakar pada lemahnya pelibatan warga sejak tahap perencanaan. Pada konteks ini, resistensi

---

bukan semata bentuk anti-lingkungan, melainkan manifestasi dari kebutuhan akan ruang partisipasi yang lebih setara.

Ketakutan warga terhadap maggot juga diperparah oleh rendahnya literasi lingkungan. Proses biokonversi oleh Black Soldier Fly (BSF) sebenarnya tidak menimbulkan bau menyengat, dan larva BSF tidak bersifat patogen serta tidak menularkan penyakit seperti lalat rumah (*Musca domestica*). Namun, kurangnya edukasi dan komunikasi publik dari pihak pelaksana membuat kekhawatiran tersebut tumbuh subur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Maryani dan Nainggolan (2019) yang menekankan pentingnya pemberdayaan melalui edukasi partisipatif dalam program lingkungan, serta Margayaningsih (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan bergantung pada inisiatif dan keterlibatan aktif masyarakat sejak awal. Lebih jauh, ketidaklibatan warga dalam perencanaan menciptakan relasi kuasa yang timpang. Masyarakat merasa menjadi objek kebijakan, bukan subjek. Dalam hal ini, Paulo Freire mengingatkan bahwa pemberdayaan harus dimulai dengan *conscientização* (kesadaran kritis) dan dilanjutkan dengan *praxis* (aksi nyata) untuk mengubah struktur ketimpangan (Akhter, S. dkk., 2023).

Pendekatan partisipatif yang dialogis dan reflektif sangat diperlukan agar masyarakat dapat menyuarkan kekhawatirannya secara konstruktif dan merasa memiliki program tersebut. Penelitian oleh Mulyaningsih (2023) di Kota Bandung membuktikan bahwa ketika pelatihan dan sosialisasi dilakukan secara partisipatif, resistensi warga terhadap rumah maggot menurun dan partisipasi meningkat. Pendekatan tersebut dibutuhkan agar program seperti rumah maggot dapat berkelanjutan, dibutuhkan strategi komunikasi publik yang tidak hanya menyampaikan informasi teknis, tetapi juga membuka ruang dialog setara. Resistensi warga bukan hambatan mutlak, tetapi sinyal bahwa pendekatan pemberdayaan perlu ditinjau ulang agar lebih inklusif, adil, dan kontekstual.

### **Strategi Mengatasi Hambatan Melalui Edukasi, Komunikasi, dan Pendekatan Sosial**

Menghadapi resistensi warga terhadap keberadaan rumah maggot, pemerintah kelurahan bersama petugas pelaksana program mengembangkan pendekatan edukatif dan persuasif untuk membangun penerimaan sosial secara bertahap. Strategi ini dijalankan melalui sosialisasi langsung yang melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan kader lingkungan sebagai agen perubahan lokal. Edukasi kepada warga menekankan bahwa keberadaan maggot justru membantu menghilangkan potensi bau busuk dari sampah organik karena larva Black Soldier Fly (BSF) mampu mencerna limbah organik dalam waktu singkat, antara 12 hingga 24 jam dalam kondisi lingkungan yang ideal. Pendekatan ini sesuai dengan hasil penelitian Mulyaningsih (2023) yang menunjukkan bahwa edukasi langsung yang bersifat partisipatif dapat mengurangi stigma negatif terhadap budidaya maggot di lingkungan padat penduduk.

Pada pelaksanaan program di lapangan, petugas maggot mengajak warga untuk melihat langsung kondisi di dalam rumah maggot. Mereka menjelaskan bahwa area pengolahan dirawat dengan sistem sanitasi dan ventilasi yang memadai, sehingga tidak menimbulkan bau menyengat maupun gangguan kenyamanan lainnya. Petugas menggambarkan bahwa beberapa warga yang semula menolak, perlahan mulai menerima bahkan mendukung program setelah melihat secara langsung bahwa rumah maggot tertata rapi dan tidak menimbulkan dampak negatif seperti yang mereka khawatirkan sebelumnya. Mereka mulai memilah sampah dari rumah tangga masing-masing dan terlibat dalam kegiatan lingkungan karena melihat hasil konkret berupa berkurangnya sampah tercecer dan lingkungan yang lebih bersih. Temuan serupa dikemukakan oleh Nurochim (2022), yang menyatakan bahwa keterlibatan langsung warga dalam melihat proses budidaya maggot meningkatkan kesadaran ekologis dan memperkuat dukungan komunitas terhadap program pengelolaan sampah.

---

Adanya pendekatan kultural dan emosional juga dilakukan melalui kampanye yang menyisipkan nilai-nilai keagamaan dan kepedulian sosial. Strategi ini terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan mengurangi resistensi, sebagaimana diungkapkan oleh Sriyani dan Wirasari (2023) dalam studi mereka di Kota Malang, bahwa pembingkai program maggot dalam konteks nilai-nilai lokal mempercepat penerimaan masyarakat. Pada konteks pemberdayaan masyarakat, keberhasilan program sangat ditentukan oleh kemampuan fasilitator untuk membangun hubungan sosial yang setara. Maryani dan Nainggolan (2019) menegaskan bahwa keberhasilan program lingkungan tidak cukup dengan penyediaan sarana dan pelatihan teknis saja, melainkan harus disertai dengan penguatan ikatan sosial dan pemberian ruang dialog agar masyarakat merasa dilibatkan, bukan sekadar diberitahu.

Lebih jauh lagi, proses edukasi melalui kampanye pemilahan sampah, pelatihan budidaya maggot, dan kunjungan ke rumah maggot menjadi wahana “pembelajaran sosial” yang membentuk kesadaran ekologis kolektif. Program ini tidak hanya menargetkan perubahan perilaku jangka pendek, tetapi juga mendorong transformasi cara pandang masyarakat terhadap sampah dari sesuatu yang kotor menjadi sumber daya bernilai ekonomi dan lingkungan. Ini sejalan dengan teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Ritzer dan Stepnisky (2019), bahwa perubahan sikap kolektif dapat dicapai ketika struktur relasi kuasa berubah dari yang hierarkis menjadi kolaboratif. Dengan demikian, upaya mengatasi hambatan sosial dalam program rumah maggot di Kelurahan Kujangsari bukan hanya mengurangi penolakan, tetapi juga membentuk komunitas warga yang aktif, sadar lingkungan, dan berdaya.

### **Kesimpulan**

Program pengelolaan sampah organik berbasis maggot di Kelurahan Kujangsari merupakan bentuk konkret dari kebijakan partisipatif yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan lingkungan. Adanya kendala hambatan berupa resistensi warga akibat stigma negatif terhadap maggot, pendekatan edukatif, komunikasi dialogis, serta pelibatan tokoh lokal berhasil mendorong transformasi sikap dan perilaku masyarakat. Program ini tidak hanya menekan volume sampah organik secara signifikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan membangun kesadaran ekologis kolektif. Keberhasilan inisiatif ini menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, serta perlunya strategi komunikasi dan sosialisasi yang adaptif dalam membangun penerimaan terhadap inovasi lingkungan di tingkat akar rumput.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pemberdayaan ini, khususnya kepada para petugas maggot, ketua RT/RW, serta warga yang telah bersedia menjadi informan. Semoga hasil pemberdayaan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di masa mendatang.

### **Referensi**

- Adhi, M., & Mursalim. (2021). Evaluasi implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 123–135.
- Akhter, S., & Zai, A. F. (2023). Empowering Marginalized Voices: Paulo Freire’s Critical Pedagogy as a Path to Social Justice and Liberation in Education. *International Journal of Multidisciplinary Research and Technology*, 4(8), 1–11.
-

- Atma, A. A., Prasetyo, H., & Sari, R. P. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik rumah tangga berbasis maggot sebagai pakan ternak lele di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 45–52.
- Detikcom. (2024). Kota Bandung hasilkan 1.796 ton sampah per hari, 803 ton tak terangkut. Detikcom. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7254327/kota-bandung-hasilkan-1796-ton-sampah-per-hari-803-ton-tak-terangkut>. Di akses tanggal 5 Mei 2025.
- GoodStats. (2024). Jawa Barat penyumbang sampah terbesar di Indonesia. GoodStats. <https://goodstats.id/article/jawa-barat-penyumbang-sampah-terbesar-di-indonesia-2024>. Di akses tanggal 5 Mei 2025
- Imelda. (2020). Pengelolaan sampah rumah tangga: Perspektif lingkungan dan kesehatan. *Jurnal Lingkungan dan Kesehatan*, 12(3), 89–97.
- Jasmin, P. R., Mabel, S., Mowainop, A., Watkuk, F., & Oja, H. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Basis Perubahan Sosial. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, 1(4), 295-304.
- Kusumastuti, R., & Kurniawan, A. (2021). Pemanfaatan Larva Black Soldier Fly (BSF) dalam Pengelolaan Sampah Organik Rumah Tangga di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pengabdian Lingkungan*, 5(2), 134–145.
- Margayaningsih, D. I. (2020). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Publiciana*, 13(1), 158–190.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Mulyaningsih, R. (2023). Strategi Sosialisasi dan Partisipasi Warga dalam Program Rumah Maggot di Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 9(1), 55–64.
- Nuraini, S., & Prasetyo, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Maggot untuk Pengelolaan Sampah Organik di Kota Malang. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 11(1), 78–89. Nuraini, S., & Prasetyo, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Maggot untuk Pengelolaan Sampah Organik di Kota Malang. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 11(1), 78–89.
- Nurochim, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Maggot di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekologi Pedesaan*, 6(1), 22–30.
- Pikiran Rakyat. (2023). TPS Pasar Kordon ditutup, warga masih buang sampah sembarangan. Pikiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-015678901/tps-pasar-kordon-ditutup-warga-masih-buang-sampah-sembarangan>. Di akses tanggal 22 Mei 2025
- Portal Bandung. (2023). Program pengelolaan sampah organik berbasis rumah tangga diluncurkan. Portal Bandung. <https://portal.bandung.go.id/berita/program-pengelolaan-sampah-organik-berbasis-rumah-tangga-diluncurkan>. Di akses tanggal 23 Mei 2025.
- Rahmawati, D. (2020). Strategi Edukatif dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Maggot di Kota Denpasar: Kajian Program dan Dampaknya terhadap Perubahan Perilaku. *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Sosial*, 9(3), 210–222.
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2017). *Sociological theory* (10th ed.). SAGE Publications.
- Sriyani, D., & Wirasari, N. (2023). Tantangan Implementasi Program Maggot di Wilayah Perkotaan: Studi Kasus di Kota Malang. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 10(2), 77–88.
- Zahra, A., Herdiansyah, H., & Utomo, S. W. (2023). Model pengelolaan sampah organik dengan biokonversi larva *Black Soldier Fly* berbasis pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 15(2), 101–112.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan sebagai penyebab konflik: kajian atas teori sosial kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157-183.
-